PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. sehubungan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe terhadap Besaran Standar Belanja, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015.**

Pasal I

1 Mengubah Sistematika Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2015, dengan mengubah BAB III Analisis Standar Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2 BAB III sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan satu kesatuan dengan BAB I, BAB II, dan BAB IV sistematika ASB Tahun 2015 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

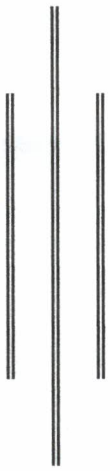
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 JULI 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

REVISI ANALISIS STANDAR BELANJA
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2015



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan RAPBK, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman penyusunan RKAP-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKAP-SKPD. Pedoman penyusunan RKAP-SKPD yang disusun oleh TAPD, mencakup beberapa hal sebagai berikut :

a. Dokumen Anggaran, meliputi KUA, PPA, Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH);
b. Singkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan program kegiatan sesuai kinerja SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
c. Batas waktu penyampaian RKAP-SKPD kepada PPKD;
d. Pedoman Penyusunan RKAP-SKPD dan DPAP-SKPD meliputi kode rekening belanja, pendapatan dan pembiayaan, Format RKAP-SKPD dan DPAP-SKPD, Kode Rekening Organisasi dan Urusan Pemerintahan serta Kode Rekening singkronisasi program dan kegiatan sesuai Urusan Pemerintahan.

Pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 dalam pasal 90 ayat (2), menjelaskan RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Sejalanan dengan perkembangan pelaksanaan APBK 2015 terdapat beberapa kondisi yang dirasakan perlu diperhatikan untuk dapat ditangani dan diakomodir dalam APBK-P 2015.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-P SKPD berdasarkan pendekatan prestasi kerja, diperlukan tolok ukur pencapaian prestasi kerja, meliputi :

a. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
b. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program kegiatan.
c. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
d. Standar Satuan Harga (SSH) merupakan harga satuan barang/jasa yang berlaku di Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
e. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Wajib Daerah.

Sebagai salah satu dokumen anggaran dalam pedoman penyusunan RKA-P SKPD dan DPPA-SKPD Kota Lhokseumawe tahun 2015, dan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, penyusunan Revisi Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Lhokseumawe, penetapan plafon harga, jenis, objek dan rincian objek belanjanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dan kemampuan pendapatan Kota Lhokseumawe. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penetapan harga dalam penyusunan Revisi ASB sebagai pedoman penyusunan APBK-P dengan memperhatikan segala kebutuhan dan penggunannya dimana setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Maksud

   Penyusunan Revisi Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Lhokseumawe tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan RKA-P SKPD dan DPPA-SKPD untuk dijadikan bahan acuan bagi setiap SKPD Kota Lhokseumawe dalam penyusunan R-APBKP Kota Lhokseumawe Tahun 2015.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Revisi ASB Kota Lhokseumawe Tahun 2015 adalah :

a. Untuk mewujudkan kualitas, efisiensi dan efektifitas penganggaran pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian kinerja dan prestasi kerja.
b. Dapat menentukan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
c. Dapat meminimalisir jumlah pengeluaran dalam pembelanjaan kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung.

C. RUANG LINGKUP

Revisi Analisis Standar Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2015 disusun dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan, efisiensi dalam pencapaian hasil dan pengeluaran kegiatan tersebut.

Standar beban kerja pada belanja langsung, yang terdapat pada 32 (tiga puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe, dengan Urusan Pemerintahan masing-masing yang meliputi:

1. Sekretariat Daerah Kota; Walikota dan Wakil Walikota
2. Sekretariat DPRK; DPRK
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat
6. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8. Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
9. Inspektorat
10. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
11. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
12. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
13. Dinas Kesehatan
14. Dinas Pekerjaan Umum
15. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan
16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
18. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
19. Dinas Syari'at Islam
20. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
21. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)
22. Kecamatan Banda Sakti
23. Kecamatan Muara Dua
24. Keamatan Blang Mangat
25. Kecamatan Muara Satu
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. PPKD
28. Kantor Pustaka dan Arsip Daerah
29. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
30. Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)
31. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
32. Sekretariat Baitul Mal

Sampel standar beban kerja yang ada pada beberapa SKPD tersebut, merupakan contoh beban kerja pada kegiatan yang spesifik, sehingga perlu ditetapkan *unit cost* masing-masing komponen belanja. Sedangkan standar biaya SKPD lainnya dapat dihitung berdasarkan Standar Beban Kerja (SBK).

BAB II
CAPAIAN KINERJA DAN NALISIS STANDAR BELANJA

A. Capaian Kinerja

APBK-P disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. RAPBK-P dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dan ditetapkan dengan Qanun. Pada dasarnya APBK-P memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Kota dalam rangka melaksanakan fungsi dan urusan pemerintah. Penyusunan APBK oleh Pemerintah Kota untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan daerah dengan pendekatan prestasi kerja berdasarkan capaian kinerja. Setiap alokasi biaya yang direncanakan dalam APBK harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang dicapai oleh kegiatan .

Penganggaran yang berdasarkan prestasi kerja tersebut merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan pada upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan. Dengan demikian, rencana anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekurang-kurangnya memuat informasi/keterangan sebagai berikut:

1) Rencana pendapatan memuat kelompok, jenis, objek dan rincian objek dan rincian objek pendapatan daerah dan fungsinya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ;
2) Rencana belanja memuat kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja;

3) Urusan Pemerintah Daerah memuat Bidang Urusan Pemerintah yang dikelola sesuai dengan tupoksi;
4) Organisasi memuat nama-nama orang atau nama SKPD selaku Pengguna Anggaran;
5) Program memuat nama program kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran bersangkutan;
6) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran bersangkutan;

Kinerja Pemerintah Kota harus dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBK-P. Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota perlu disusun Revisi Analisis Standar Belanja (ASB).

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kota dalam melaksanakan kewenangannya. Selanjutnya untuk penilaian capaian kinerja didasarkan pada prestasi kerja melalui indikator kinerja, tolok ukur kinerja dan target kinerja.

A. Indikator Kinerja, meliputi:
   1) Masukan *(input)*, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber : dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagaimana yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
   2) Keluaran *(Output)* adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan;
   3) Hasil *(outcome)* adalah tingkat keberhasilan atau kegiatan yang sudah dilaksanakan dan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran-keluaran dari kegiatan.
B. Tolok ukur kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan factor kualitas, kuantitas efisiensi dan efektifitas pelaksana dari setiap program kegiatan.

C. Target Kinerja, sasaran atau target yang merupakan pencapaian hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

B. Revisi Analisis Standar Belanja

Revisi Analisis Standar Belanja (ASB) adalah tolok ukur kinerja dalam menganalisa anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, Revisi Analisis Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja dalam satu Tahun Anggaran. Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan. Analisis Standar Belanja atau standar beban kerja dihitung oleh masing-masing Satuan Kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program dan atau kegiatan. Usulan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan buku Revisi Analisis Standar Belanja (ASB) akan ditolak atau direvisi sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam rangka menyiapkan Rencana APBK-P Tahun 2015, buku Revisi ASB digunakan sebagai standar atau pedoman dalam pengalokasian dana masing-masing kegiatan yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja berdasarkan penilaian kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya.

Penilaian kewajaran beban kerja adalah :

1) Kaitan dan logis antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan program dan prioritas anggaran;
2) Kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan Tupoksi Satuan Kerja yang bersangkutan;
3) Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Penilaian kewajaran biaya adalah :

1) Kesesuaian antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja (standar biaya);
2) Kesesuaian antara standar biaya dengan harga yang berlaku;
3) Kesesuaian antara biaya yang dianggarkan dan target pencapaian kinerja dengan sumber dana.

Dengan demikian, usulan program kegiatan yang disusun oleh SKPD adalah merupakan program/ kegiatan yang belanjanya harus berdasarkan ASB beserta Revisinya.

BAB III
REVISI ANALISIS STANDAR BELANJA LANGSUNG DAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

BELANJA DAERAH	ASB 2015	REVISI ASB 2015
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG		
BELANJA PEGAWAI		
A. GAJI DAN TUNJANGAN		
1.A Iuran Asuransi Kesehatan		
* Premi Asuransi kesehatan Walikota (pertahun)	60,000,000	60,000,000
* Premi Asuransi kesehatan Wakil Walikota (pertahun)	50,000,000	50,000,000
* Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota Dewan	15,000,000	15,000,000
2.A Tunjangan Perumahan[2])		
Tunjangan perumahan untuk legislatif per bulan		
* Ketua DPRD	10,000,000	10,000,000
* Wakil Ketua	8,500,000	8,500,000
* Anggota	8,000,000	8,000,000
B. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		
1.B Tambahan Penghasilan Berdasarkan		
Prestasi Kerja (per bulan)		
* Eselon II a (Sekda)	7,500,000	7,500,000
* Eselon II b (Asisten)	3,500,000	3,500,000
* Eselon II b (Staf Ahli)	2,500,000	**3,000,000**
* Eselon II b (Kepala Badan, Kepala Dinas)	3,000,000	3,000,000
* Eselon III		
* Eselon III a	1,300,000	**1,500,000**
* Eselon III b	1,200,000	**1,400,000**
* Eselon IV		
* Eselon IV a	900,000	**1,000,000**
* Eselon IV b	800,000	**900,000**
* PNS Golongan IV	1,000,000	**1,200,000**
* PNS Golongan III	700,000	**800,000**
* PNS Golongan II	500,000	**600,000**
* PNS Golongan I	500,000	500,000
* Auditor Golongan III	900,000	900,000
* Auditor Golongan II	700,000	700,000
* Pengawas dan Kepala Sekolah TK/RA	750,000	750,000
* Pengawas dan Kepala Sekolah SD/MI	750,000	750,000
* Pengawas dan Kepala Sekolah SMP/MTs	1,000,000	1,000,000
* Pengawas dan Kepala Sekolah SMA/SMK	1,250,000	1,250,000
* Kepala Puskesmas	1,000,000	1,000,000
* Ka. TU Puskesmas	750,000	750,000
* Ka. UPTD SKB	750,000	750,000
2.B Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
(per bulan)		
a. Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Lembaga Daerah		
Walikota	30,000,000	30,000,000
Wakil Walikota	20,000,000	20,000,000
Eselon II a	10,000,000	10,000,000
Eselon II b (Asisten)	5,000,000	5,000,000
Eselon II b (Staff Ahli)	1,750,000	1,750,000
Eselon II b (Kepala Badan dan Kepala Dinas)	5,000,000	5,000,000
Eselon III a (Kepala Kantor/Sekretaris Lembaga	3,000,000	3,000,000
Keistimewaan Daerah		
Eselon III a (Camat)	3,500,000	3,500,000
Eselon III a (Kepala Bagian)	3,000,000	3,000,000
Eselon IV a (Sekretariat Daerah)	875,000	875,000
ADC	1,000,000	1,000,000
b. * Beban Kerja Tenaga Perencana (Bappeda)		
Eselon III	1,000,000	1,000,000
Eselon IV	875,000	875,000
Staf	500,000	500,000
* Insentif Beban Kerja (Bappeda)		
Tenaga Honor/Bakti	400,000	400,000
c. * Beban Kerja Tenaga Keuangan (DPKAD)		
Eselon III	1,000,000	1,000,000
Eselon IV	875,000	875,000
Staf	500,000	500,000
* Insentif Beban Kerja (DPKAD)		
Tenaga Honor/Bakti	400,000	400,000

d. * Beban Kerja Tenaga Pengawasan (Inspektorat)		
Eselon III	1,000,000	1,000,000
Eselon IV	875,000	875,000
Auditor Golongan III	850,000	850,000
Auditor Golongan II	750,000	750,000
Staf	500,000	500,000
* Insentif Beban Kerja (Inspektorat)		
Tenaga Honor/Bakti	400,000	400,000
e. * Beban Kerja Sekretariat DPRK		
Eselon III	1,000,000	1,000,000
Eselon IV	875,000	875,000
Staf	500,000	500,000
* Insentif Beban Kerja (DPRK)		
Tenaga Honor/Bakti	400,000	400,000
f * Beban Kerja KP2T		
Eselon IV	875,000	875,000
Staf	500,000	500,000
* Insentif Beban Kerja (KP2T)		
Tenaga Honor/Bakti	400,000	400,000
g * Insentif (Setdako)		
Sekretaris Walikota	-	**500,000**
Sekretaris Wakil Walikota	-	**500,000**
Sekretaris Sekda	-	**500,000**
Sekretaris Asisrten I	-	**500,000**
Sekretaris Asisrten II	-	**500,000**
Sekretaris Asisrten III	-	**500,000**
Sopir Walikota, Wakil dan Sekda	-	**500,000**
Sopir Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	-	**500,000**
Supir Dharma Wanita	-	**500,000**
Ajudan KDH/WKDH	-	**750,000**
Ajudan Sekda	-	**750,000**
Ajudan Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	-	**750,000**
PKD di Setdako, Rumah KDH/WKDH dan Sekda	-	**500,000**
PKD Gedung PKA	-	**500,000**
Koordinator Pantup	-	**1,000,000**
Koordinator Piket Keamanan	-	**1,000,000**
Koordinator Sound System	-	**1,000,000**
h * Insentif Beban Kerja (BLHK)		
Mandor	-	**300,000**
Ops Mekanis	-	**250,000**
3. a. Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya		
Tambahan Uang Meugang (3 Kali Setahun)		
* Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRK	2,000,000	2,000,000
* Wakil Ketua DPRK	1,500,000	1,500,000
* Sekda	1,500,000	1,500,000
* Anggota DPRK	1,250,000	1,250,000
* Eselon II	1,000,000	1,000,000
* Eselon III	800,000	800,000
* Eselon IV	600,000	600,000
* Auditor	500,000	500,000
* Staf Golongan IV	500,000	500,000
* Staf Golongan III	400,000	400,000
* Staf Golongan I dan II	300,000	300,000
b. Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya		
* Baitul Mal		
- Kepala	500,000	500,000
- Anggota	200,000	200,000
* Dewan Pengawas Syariah		
- Ketua	500,000	500,000
- Wakil Ketua	500,000	500,000
- Anggota	200,000	200,000
* MPU		
- Ketua	800,000	800,000
- Wakil Ketua I	500,000	500,000
- Wakil Ketua II	500,000	500,000
- Anggota	200,000	200,000
* MAA		
- Ketua	800,000	800,000
- Wakil	500,000	500,000
- Kepala Bidang	300,000	300,000
- Anggota	200,000	200,000

* MPD		
- Ketua	800,000	800,000
- Wakil ketua	500,000	500,000
- Dewan Pakar/Ketua Komisi/Anggota	250,000	250,000
* Honor Daerah / Bakti	200,000	200,000
* Tenaga Harian Lepas(THL)	150,000	150,000
II. BELANJA LANGSUNG		
A. BELANJA PEGAWAI		
1. Honorarium PNS		
1. Honorarium Pengelola Keuangan		
a. SETDAKO		
1 Pengguna Anggaran/Barang	1,000,000	1,000,000
2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	800,000	800,000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700,000	700,000
4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	750,000	750,000
5 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	700,000	700,000
6 Bendahara Pengeluaran	750,000	750,000
7 Perangkat Bendahara Pengeluaran		
a. Pembuat Dokumen Pengeluaran	400,000	400,000
b. Pencatat Pembukuan	400,000	400,000
c. Pembuat Daftar Gaji	400,000	400,000
d. Kasir Penyimpanan/ Pembayaran	400,000	400,000
e. Tenaga Administrasi	400,000	400,000
8 Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus KDH/WKDH	400,000	400,000
9 Bendahara Pengeluaran Pembantu	550,000	550,000
* Tenaga Administrasi	300,000	300,000
10 Penyimpan/Pengurus Barang	550,000	550,000
11 Pembantu Penyimpan/Pengurus Barang	350,000	**400,000**
12 Pembantu TU	200,000	200,000
13 Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembatu		
Caraka	-	**200,000**
b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		
1 Pengguna Anggaran/Barang	1,000,000	1,000,000
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD	750,000	750,000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700,000	700,000
4 PPTK-SKPD	700,000	700,000
5 Bendahara Pengeluaran	750,000	750,000
6 Perangkat Bendahara Pengeluaran Dinas		
a. Pembuat Dokumen	500,000	500,000
b. Pencatat Pembukuan	500,000	500,000
c. Kasir Simpan dan Bayar	500,000	500,000
d. Pembuat Daftar Gaji	500,000	500,000
e. Tenaga Adm	500,000	500,000
7 Kuasa PA (Sekolah/SKB)	800,000	800,000
8 Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sekolah + SKB)	500,000	500,000
9 Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu :		
a. Pembuat daftar Gaji (Sekolah Menengah + SKB)	200,000	200,000
b. Tenaga Adm (Sekolah Menengah + SKB)	200,000	200,000
10 Penyimpan/Pengurus Barang	550,000	550,000
11 Penyimpan/Pengurus Barang Pembantu(sekolah+SKB)	350,000	**400,000**
c. Dinas Kesehatan		
1 Pengguna Anggaran/Barang, KPA/KPB	1,000,000	1,000,000
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD	750,000	750,000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700,000	700,000
4 PPTK-SKPD	700,000	700,000
5 Bendahara Pengeluaran	750,000	750,000
Perangkat Bendahara Pengeluaran		
a. Pembuat Dokumen	500,000	500,000
b. Pencatat Pembukuan	500,000	500,000
c.. Kasir Simpan dan Bayar	500,000	500,000
d. Pembuat Daftar Gaji	500,000	500,000
e. Tenaga Adm	500,000	500,000
6 Kuasa PA (Masing-Masing Kepala Puskesmas)	800,000	800,000
7 Bendahara Pengeluaran Pembantu	500,000	500,000
(Masing-Masing Puskesmas) Perangkat Bendahara		
Pengeluaran Pembantu :		
1. Pembuat daftar gaji	200,000	200,000
2. Tenaga Adm	200,000	200,000
8 Bendahara Penerimaan	500,000	500,000
9 Penyimpan/Pengurus Barang	550,000	550,000
10 Penyimpan/Pengurus obat	350,000	350,000
11 Penyimpan/Pengurus Barang Pembantu (Puskesmas)	250,000	250,000

d. Dinas Pekerjaan Umum		
1 Pengguna Anggaran/Barang	1,000,000	1,000,000
2 Pejabat Penatausahaan K-euangan-SKPD	750,000	750,000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700,000	700,000
4 PPTK-SKPD	700,000	700,000
5 Bendahara Pengeluaran	750,000	750,000
6 Bendahara Penerimaan	500,000	500,000
Perangkat Bendahara Pengeluaran		
a. Pembuat Dokumen	400,000	400,000
b. Pencatat Pembukuan	400,000	400,000
c.. Kasir Simpan dan Bayar	400,000	400,000
d. Pembuat Daftar Gaji	400,000	400,000
e. Tenaga Adm	400,000	400,000
7 Penyimpan/Pengurus Barang	550,000	550,000
8 Penyimpan/Pengurus Barang Pembantu	350,000	**400,000**
e. Dinas, Badan dan Setwan		
1 Pengguna Angaran/Barang	1,000,000	1,000,000
2 Kuasa Pengguna Anggaran	800,000	800,000
3 Pejabat Penatausahaan Keuangan- SKPD	750,000	750,000
4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	700,000	700,000
5 PPTK- SKPD	700,000	700,000
6 Bendahara Pengeluaran	750,000	750,000
7 Bendahara Penerimaan	500,000	500,000
8 Pembantu Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:		
a. Pembuat Dokumen	400,000	400,000
b. Pencatat Pembukuan	400,000	400,000
c. Pembuat Daftar Gaji	400,000	400,000
d. Kasir Penyimpanan Pembayaran	400,000	400,000
e. Tenaga Adm	400,000	400,000
9 Penyimpan/Pengurus Barang	550,000	550,000
10 Pembantu Penyimpan/Pengurus Barang	350,000	**400,000**
f. Kantor/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Daerah		
1 Pengguna Anggaran/Barang	800,000	800,000
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan- SKPD	650,000	650,000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600,000	600,000
4 PPTK	600,000	600,000
5 Bendahara Pengeluaran	650,000	650,000
6 Bendahara Penerimaan	350,000	350,000
7 Pembantu Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:		
a. Pembuat Dokumen	300,000	300,000
b. Pembuat Daftar Gaji	300,000	300,000
c. Tenaga Adm	300,000	300,000
8 Penyimpan/Pengurus Barang	400,000	400,000
g. Kecamatan		
1 Pengguna Anggaran/Barang	800,000	800,000
2 Pejabat Penatausahaan Keuangan	650,000	650,000
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600,000	600,000
4 PPTK	600,000	600,000
5 Bendahara Pengeluaran	650,000	650,000
6 Pembantu Bendahara Pengeluaran Sebagai berikut:		
- Pencatat pembukuan	300,000	300,000
- Pembuat daftar gaji	300,000	300,000
- Tenaga administrasi	300,000	300,000
7 Penyimpan/Pengurus Barang	400,000	400,000
Ket :		
*** Untuk Setdako, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan: Pengelola Adm Keuangan dianggarkan pada SKPD induk. Kabag, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas yang ditunjuk sebagai KPA/KPB, Pelaksanaan tugas, Tanggung Jawab dan wewenangnya ditentukan dalam SK KPA/PB yang ditetapkan melalui SK Walikota**		
h. UPTD		
1 PPTK (Ka. UPTD)	400,000	400,000
2 Tenaga Adm UPTD	350,000	350,000
i. B U D		
* Pejabat BUD	4,500,000	4,500,000
* Kuasa BUD	3,000,000	3,000,000
* Pembantu Kuasa BUD	1,500,000	1,500,000
* Bendahara Penerimaan PPKD	500,000	500,000
* Staf Pembantu Kuasa BUD	400,000	400,000
* Staf Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD	350,000	350,000
* Staf Pembantu Bendahara Penerimaan DPKAD	350,000	350,000



j. PPKD		
* Pengguna Anggaran PPKD	1,000,000	1,000,000
* Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD	800,000	800,000
* Bendahara pengeluaran PPKD	800,000	800,000
* Penyimpan dan Pembayar Uang	-	**400,000**
* Pembuat Dokumen Pengeluaran	-	**400,000**
* Bendahara Penerimaan PPKD	-	**500,000**
* Pembantu bendahara pengeluaran PPKD:		
- Pencatat pembukuan	400,000	400,000
- Tenaga administrasi	400,000	400,000
k. Pengelola Keuangan PPKD pada SKPD		
* Penanggung Jawab	600,000	**700,000**
* Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	**600,000**
* Koordinator	500,000	**600,000**
* Juru Bayar	400,000	**500,000**
* Staf Administrasi	250,000	**400,000**
2. Honorarium TPTGR		
a. Majelis Pertimbangan TPTGR (Per Sidang)		
* Penanggung Jawab	2,500,000	2,500,000
* Pembina	2,300,000	2,300,000
* Ketua Merangkap Anggota	2,200,000	2,200,000
* Wakil Ketua I Merangkap Anggota	2,000,000	2,000,000
* Wakil Ketua II Merangkap Anggota	2,000,000	2,000,000
* Sekretaris Merangkap Anggota	1,500,000	1,500,000
* Anggota	1,200,000	1,200,000
b. Sekretariat TPTGR		
* Kepala Pelaksana Sekretariat	1,500,000	1,500,000
* Sekretaris	1,300,000	1,300,000
* Pelaksana Administrasi	1,200,000	1,200,000
3 Honorarium PNS/Non PNS		
a. Honorarium Tenaga ahli DPRK (LS)	5,000,000	5,000,000
b. Honorarium Instruktur / Pelatih/ Fasilitator		
1. Honorarium Instruktur/ Pelatih/ Fasiltator yang bersifat praktek lapangan, aplikasi dan yang bersifat bimbingan dan tatap muka dalam kelas dihitung per jam (satu jam = 45 Menit) , dengan rincian sbb:		
1. Instruktur Daerah	250,000	250,000
* Asisten Instruktur Daerah	200,000	200,000
2. Instruktur Luar Daerah	350,000	350,000
* Asisten Instruktur Luar Daerah	250,000	250,000
* Untuk Pendamping	200,000	200,000
3. Dewan Juri	300,000	300,000
2 Honorarium Pemakalah Seminar (Sekali Tatap Muka)		
* Narasumber Daerah	350,000	**500,000**
* Narasumber Luar Daerah (Provinsi)	400,000	**700,000**
* Narasumber Luar Daerah (Pusat)	600,000	**1,000,000**
* Moderator Daerah	250,000	**300,000**
* Moderator Luar Daerah	300,000	**350,000**
3 Honorarium Troublesshooting SIMPUS		
* Narasumber Luar Daerah (Pronvinsi)	-	**1,000,000**
- Penginapan		**600,000**
- Transportasi		**300,000**
* Narasumber Luar Daerah (Pusat)	-	**1,500,000**
- Penginapan		**600,000**
- Transportasi		**300,000**
c. Honorarium Lembaga Keistimewaan Aceh		
* Honorarium Lembaga Pengurus IC	-	**2,000,000**
* Honorarium Lembaga Panitia Pembangunan Mesjid IC	-	**1,900,000**
* Honorarium Lembaga Pengurus PPTQ	-	**700,000**
* Honorarium Lembaga Petugas PPTQ	-	**400,000**
* Honorarium Lembaga Guru IPQAH	-	**400,000**
* Honorarium Lembaga Pengurus IPQAH	-	**700,000**
d. Honorarium Tenaga Keagamaan dan Adat		
1. Pemberian Jasa Keagamaan		
* Pimpinan / pengasuh Dayah Type A	500,000	500,000
* Guru Dayah Type A	350,000	350,000
* Pimpinan / pengasuh Dayah Type B	450,000	450,000
* Guru Dayah Type B	300,000	300,000
* Pengurus Panti/ Pimpinan	700,000	700,000
* Guru Panti	600,000	600,000
* Pimpinan Balai Pengajian	400,000	400,000
* Guru Balai Pengajian Desa	250,000	250,000

* Guru Pengajian Pemko	1,000,000	1,000,000
* Guru Qori/Qoriah Alquran	600,000	600,000
* Guru Tahfizzul Quran	1,800,000	1,800,000
* Juru Masak	1,200,000	1,200,000
* Imam Mesjid	750,000	750,000
* Bilal Mesjid	500,000	500,000
* Imam Gampong	600,000	600,000
* Bilal Gampong	400,000	400,000
* Petugas Penjaga Makam	500,000	500,000
* Staf Mukim	-	**300,000**
* Muspika	-	**1,000,000**
2 Pengurus Islamic Center		
* Ketua Umum	-	**2,000,000**
* Ketua I	-	**1,400,000**
* Ketua II	-	**1,400,000**
* Sekretaris Umum	-	**1,400,000**
* Sekretaris I	-	**1,400,000**
* Sekretaris II	-	**1,000,000**
* Bendahara	-	**2,000,000**
* Koordinator Peribadatan	-	**1,400,000**
* Kasi Peribadatan	-	**1,400,000**
* Kasi Sosial	-	**1,000,000**
* Kasi Perlengkapan	-	**500,000**
* Operator Komputer	-	**1,000,000**
3 Petugas Islamic Center		
* Imum Besar	1,800,000	1,800,000
* Wakil I Imam Besar	1,750,000	1,750,000
* Wakil II Imam Besar	1,400,000	1,400,000
* Imum Tetap	1,500,000	1,500,000
* Direktur LP3M	500,000	500,000
* Koordinator Majelis Taklim	500,000	500,000
* Naib Imam	500,000	500,000
* Naib Muazin	500,000	500,000
* Cleaning Service	1,200,000	1,200,000
* Petugas Taman	700,000	700,000
* Komandan Tenaga Keamanan	1,300,000	1,300,000
* Tenaga Keamanan	1,000,000	1,000,000
4 Pemberian Jasa Tenaga Adat		
* P3A / Kejreun Blang	500,000	500,000
* Panglima Laot Kota Lhokseumawe	650,000	650,000
* Panglima Laot Kecamatan	600,000	600,000
* sekretaris Panglima Laot Kota Lhokseumawe	550,000	550,000
5 Belanja khusus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja uang saku pelatihan dalam daerah (per hari)	50,000	**100,000**
6 Uang Lembur		
- PNS (Per Hari)	-	**80,000**
- Non PNS (Per Hari)	-	**60,000**
7 **HONORARIUM NON PNS:**		

No	URAIAN	ASB 2015		REVISI ASB 2015	
		HONDA	BAKTI	HONDA	BAKTI
a.	Honor Daerah Adm Kantor				
	* Honor bulanan / gaji / upah	900,000	500,000	900,000	500,000
b.	Supir pada SKPD	900,000	900,000	900,000	900,000
	Supir Bus Perhubungan	900,000	750,000	900,000	750,000
c.	Jasa tenaga keamanan/jaga malam pada SKPD				
	* Honor bulanan	900,000	900,000	900,000	900,000
d.	Jasa Satpol PP				
	* Honor bulanan / gaji	900,000	900,000	900,000	900,000
e.	Jasa Petugas WH				
	* Honor bulanan / gaji	900,000	900,000	900,000	900,000
f.	Jasa Tenaga Kebersihan				
	* Honor bulanan / gaji	900,000	900,000	900,000	900,000
g.	Jasa Penyuluh Lapangan (PPL) / Mantri Tani				
	* Honor bulanan / gaji	900,000	500,000	900,000	500,000
h.	Juru sandi				
	* Honor bulanan / gaji	900,000	500,000	900,000	500,000
	* Pembantu Juru sandi	900,000	500,000	900,000	500,000
i.	Penyediaan Jasa Pendidikan dan Kesehatan				
	1. Pegawai Honor Daerah				
	* Honorarium bulanan guru Honor Daerah (TK, SD, SLTP dan SLTA)	900,000	500,000	900,000	500,000
	* Honorarium bulanan TU/ Petugas Adm Sekolah (TK, SD, SLTP dan SLTA)	900,000	500,000	900,000	500,000

	* Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan(TFL)Dinas PU	-	-	-	**1,000,000**
	* Honorarium Bulanan Tenaga Medis/ Kesehatan	900,000	500,000	900,000	500,000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Adm Kesehatan	900,000	500,000	900,000	500,000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Skil Komunikasi (DPRK)	-	500,000	-	500,000
	* Honorarium Bulanan Tenaga Operator (DPRK)	-	500,000	-	500,000
	* Honorarium Tenaga Teknis/Umum	-	1,250,000	-	1,250,000
i.	Honorarium Pamtup (Polri)	-	1,000,000	-	1,000,000
k.	Pamtup Sipil	-	900,000	-	900,000
l.	Honorarium Supir (Bulanan)				
	* Supir Walikota	-	1,500,000	-	1,500,000
	* Supir Wakil Walikota	-	1,500,000	-	1,500,000
	* Supir Sekda	-	1,500,000	-	1,500,000
	* Supir Ketua DPRK	-	1,500,000	-	1,500,000
	* Supir Wakil Ketua DPRK	-	1,500,000	-	1,500,000
	* Supir Asisten Walikota	-	1,000,000	-	1,000,000
	* Supir Ketua PKK	-	900,000	-	900,000
	* Supir Wakil Ketua PKK	-	900,000	-	900,000
	* Supir Ketua Dhrmawanita	-	-	-	**900,000**
m.	ADC (Bulanan)				
	* ADC Walikota	-	1,250,000	-	1,250,000
	* ADC Wakil Walikota	-	1,250,000	-	1,250,000
	* ADC Sekda	-	1,250,000	-	1,250,000
	* ADC Ketua DPRK	-	1,250,000	-	1,250,000
	* ADC Wakil Ketua DPRK	-	1,250,000	-	1,250,000
	* ADC Ketua PKK	-	820,000	-	820,000
	* ADC Wakil Ketua PKK	-	820,000	-	820,000
	* ADC Ketua Dharma Wanita	-	820,000	-	820,000
n.	Pamtup (Bulanan)				
	* Pamtup Khusus Walikota	-	1,250,000	-	1,250,000
	* Pamtup Khusus Wakil Walikota	-	1,250,000	-	1,250,000
	* Pamtup Khusus Sekwan	-	1,250,000	-	1,250,000
	* Pamtup Khusus Sekda	-	1,250,000	-	1,250,000
	* Pamtup Khusus Kadis DPKAD	-	1,250,000	-	1,250,000
	* Pamtup Khusus Ketua DPRK	-	1,250,000	-	1,250,000
	* Pamtup Khusus Wakil Ketua DPRK	-	1,250,000	-	1,250,000
	* Koordinator Pantup Dinas PU		-		**1,250,000**
	* Pantup Dinas PU		-		**1,000,000**
o.	Pramuwisma (Bulanan)				
	* Rumah Walikota	-	1,000,000	-	1,000,000
	* Rumah Wakil Walikota	-	1,000,000	-	1,000,000
	* Rumah Pimpinan DPRK	-	1,000,000	-	1,000,000
	* Rumah Sekda	-	1,000,000	-	1,000,000
	* TMP Blang Panyang		-		**500,000**
P.	Tenaga Teknisi Umum				
	* Tenaga Teknisi Umum DPKAD	-	-	-	**1,000,000**
Q.	Tenaga Harian Lepas				
	* Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya	-	300,000	-	300,000
	* Tenaga Guru	-	350,000	-	350,000
	* Tenaga Kebersihan/Pemadam	-	400,000	-	400,000
	* Tenaga Satpam/Keamanan, Penjaga Malam, Sopir Tenaga Lapangan Satpol PP	-	500,000	-	500,000
	* Sopir BPBD	-	700,000	-	700,000
	* Tenaga Khusus Medis	-	1,000,000	-	**1,500,000**
	* Tenaga Perwakilan Pusat	-	2,000,000	-	2,000,000
	Upah / gaji Non pegawai pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan / hari				
	* Operator Beco/ mekanik/kepala/operator buldozer dan operator escavator			60,000	60,000
	* Helper operator beco, helper buldozer dan helper escavator			55,000	55,000
	* Supir Truck			55,000	55,000
	* Pekerja (buruh) kebersihan			50,000	50,000
	* Mandor lapangan			55,000	55,000
	* Operator Tando			50,000	50,000
	* Mekanik Tando/mekanik pembantu			55,000	55,000
	* Uang makan buruh			9,000	9,000
	* Uang Jasa/Pesangon Buruh Kebersihan			-	**5,000,000**
	Upah / gaji Tenaga Pemadam Kebakaran / Bulan				
	* Honor Danru Pemadam Kebakaran			1,500,000	1,500,000
	* Honor Sopir Pemadam Kebakaran			1,400,000	1,400,000
	* Honor Mekanik Pemadam Kebakaran			1,400,000	1,400,000
	* Honor Anggota Pemadam Kebakaran			1,250,000	1,250,000
f.	Honorarium Perangkat Desa/Kelurahan				
	* Imum Mukim			1,200,000	1,200,000
	* Kepala Desa			1,400,000	1,400,000
	* Sekdes (Non PNS)			800,000	800,000
	* Sekretaris Mukim			700,000	700,000
	* Kepala Urusan			-	**600,000**
	* Kepala Dusun/Ka. Lingkungan			600,000	600,000

g. Honorarium Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)		
* Tunjangan Kesejahteraan Ketua MPU	4,500,000	4,500,000
* Tunjangan Kesejahteraan Wakil Ketua MPU	3,500,000	3,500,000
* Tunjangan Kesejahteraan Anggota MPU	3,100,000	3,100,000
* Tunjangan Kesejahteraan Ketua DKU	1,000,000	1,000,000
* Tunjangan Kesejahteraan Anggota DKU	800,000	800,000
h. Honorarium Majelis Adat Aceh (MAA)		
* Ketua	2,500,000	2,500,000
* Wakil Ketua I	1,000,000	1,000,000
* Wakil Ketua II	1,000,000	1,000,000
* Kepala Bidang	600,000	600,000
* Anggota	500,000	500,000
i. Honorarium Pengurus Baitul Mal		
* Kepala	2,500,000	2,500,000
* Anggota Seksi	1,500,000	1,500,000
i.1 Honorarium Dewan Pengawas Syariah		
* Ketua	1,500,000	1,500,000
* Wakil Ketua	1,250,000	1,250,000
* Anggota	600,000	600,000
j. Honorarium Majelis Pendidikan Daerah (MPD)		
* Ketua	2,500,000	2,500,000
* Wakil Ketua	1,000,000	1,000,000
* Dewan Pakar	1,000,000	1,000,000
* Ketua Komisi	700,000	700,000
* Anggota	500,000	500,000
k. Honorarium Pengurus Harian Majelis Pendidikan Daerah (MPD)		
* Ketua	-	**2,500,000**
* Wakil Ketua	-	**1,000,000**
* Ketua Komisi Pengembangan SDM	-	**700,000**
* Anggota Komisi Pembinaan dan Program	-	**500,000**
* Anggota Komisi Pengembangan SDM	-	**500,000**
Komisi Pembinaan dan Pengembangan program		
* Ketua	-	**700,000**
Komisi Pengembangan Organisasi		
* Ketua	-	**700,000**
* Anggota	-	**500,000**
Komisi Monitoring dan Evaluasi		
* Ketua	-	**700,000**
* Anggota	-	**500,000**
l. Honorarium Pengelola Persandian		
* Penanggung Jawab	-	**500,000**
* Pendukung Persandian	-	**300,000**
4 Uang Saku Kegiatan		
a. Uang Saku Kegiatan ONS Guru SD/SMP		
* Uang Saku Peserta ke Provinsi	-	**200,000**
b. Uang Saku Olimpiade Terapan Siswa SMK (OTSN)		
* Uang Saku Peserta ke Provinsi	-	**200,000**
c. Uang Saku Dalam Daerah	-	**100,000**
B. Belanja Barang dan jasa		
1. Belanja penunjang kegiatan Organisasi		
* Penunjang kegiatan Sekretariat Daerah /bulan	10,000,000	10,000,000
* Penunjang kegiatan Kecamatan /bulan	3,000,000	3,000,000
* Penunjang kegiatan Mukim per bulan	1,000,000	1,000,000
* Penunjang kegiatan Desa /bulan	750,000	750,000
* Penunjang kegiatan PKK Kecamatan / tahun	6,000,000	6,000,000
2. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS		
1 * Mukim/orang	3,000,000	3,000,000
2 * Tenaga Kebersihan		
- Asuransi Kesehatan/orang	50,000	50,000
- Asuransi Ketenagakerjaan/orang	60,000	60,000
3 * Tenaga Satpol PP		
- Asuransi Kesehatan/orang	45,000	45,000
- Asuransi Ketenagakerjaan/orang	56,160	56,160
4 * Tenaga Pemadam Kebakaran		
- Asuransi Kesehatan/orang	65,000	65,000
3 Belanja Kecelakaan Lantas Pihak Ketiga		
1 Belanja Kecelakaan Lantas Pihak Ketiga Armada Kebersihan	-	**40,000,000**
4 Belanja STNK dan PKB		
* Belanja STNK	0	**1,700,000**
* Belanja PKB	0	**1,500,000**
5 Belanja Perawatan Kenderan Bermotor		
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan		
01 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas		
a. Belanja Bahan Bakar Minyak kenderaan Jabatan		
* Walikota / Wakil Walikota	3 juta/bulan	3 juta/bulan
* Sekda	2,5 juta/bulan	2,5 juta/bulan

	* Asisten	1,8 juta/bulan	1,8 juta/bulan
	* Ka. Badan/ Ka. Dinas/ Ka. Kantor/ Kabag	1,8 juta/bulan	1,8 juta/bulan
	* Lembaga Keistimewaan Daerah	1,5 juta/bulan	1,5 juta/bulan
	* Camat	1,5 juta/bulan	1,5 juta/bulan
	* Ketua DPRK	3 juta/bulan	3 juta/bulan
	* Wakil Ketua DPRK	2,5 juta/bulan	2,5 juta/bulan
	* TP PKK/DW	1,8 juta/bulan	1,8 juta/bulan
	b. Belanja Bahan Bakar Minyak Kenderaan		
	* Kenderaan Pool	1,8 juta/bulan	1,8 juta/bulan
	* Kenderaan Operasional Kebersihan	1 juta/bulan	1 juta/bulan
	* Mobil WH	1 juta/bulan	1 juta/bulan
	* Mobil Ambulance	1 juta/bulan	1 juta/bulan
	* Mobil Satpol PP	1 juta/bulan	1 juta/bulan
	* Bus Sekolah	1 juta/bulan	1 juta/bulan
	* Mobil Pamtup KDH/WKDH	1,5 juta/bulan	1,5 juta/bulan
	* Mobil Dekranas	-	**1,2 juta/bln**
	* Mobil Operasional Disperindakop	-	**1,8 juta/bln**
	* Mobil Operasional UUTP	-	**500 Ribu/bln**
02	Belanja Jasa Service Kenderaan		
	* Mobil Operasional Setdako/Pool (LS)	-	**140,000,000**
	* Kendaraan Pool (per tahun - Per Unit)	10,000,000	10,000,000
	* Kendaraan Operasional Kebersihan (per tahun - Per Unit)	6,000,000	6,000,000
	* Mobil WH	6,000,000	6,000,000
	* Mobil Ambulance (per tahun - Per Unit)	6,000,000	6,000,000
	* Mobil Satpol PP (per tahun - Per Unit)	6,000,000	6,000,000
	* Bus Sekolah (per tahun - Per Unit)	6,000,000	6,000,000
	* Grader (per tahun - Per Unit)	-	**25,000,000**
	* Compact (per tahun - Per Unit)	-	**10,000,000**
	* Excavator (per tahun - Per Unit)	-	**20,000,000**
03	Belanja Jasa Service Kendaraan Jabatan		
	* Walikota	25,000,000	25,000,000
	* Wakil Walikota	20,000,000	20,000,000
	* Sekda	20,000,000	20,000,000
	* Ketua DPRK	20,000,000	20,000,000
	* Pimpinan DPRK	20,000,000	20,000,000
	* Asisten/ Ka. Badan / Ka. Dinas / Ka. Kantor / Ka. Bagian /	10,000,000	10,000,000
04	Belanja Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan dan Gedung Kantor		
	* Belanja Pemeliharaan peralatan kantor		
	- Biaya perbaikan komputer	350,000	350,000
	- Biaya perbaikan Air conditioner (AC)	350,000	350,000
05	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung		
	* Rumah KDH	-	**27,000,000**
	* Rumah WKDH	-	**27,000,000**
	* Rumah Sekda	-	**15,000,000**
	* Gedung Kantor	-	**14,000,000**
6	**Belanja Cetak dan Penggandaan**		
	01. Belanja Cetak untuk :		
	a. Sekolah (per siswa/bulan)		
	- SLTP	2,000	2,000
	- SLTA	6,000	6,000
	- SMK	6,000	6,000
	b. Puskesmas	500,000	500,000
	02. Belanja Penggandaan/Foto copy untuk :		
	a. Sekolah (per siswa/bulan)		
	- SLTP	1,500	1,500
	- SLTA	6,000	6,000
	- SMK	6,000	6,000
	b. Puskesmas	300,000	300,000
	03. Belanja bahan praktikum per bulan/siswa		
	- SLTP	7,150	7,150
	- SLTA	10,000	10,000
	- SMK	30,000	30,000
7	**Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir**		
	01. Belanja sewa rumah jabatan/ rumah dinas (LS)		
	* Walikota	135.000.000/Thn	135.000.000/Thn
	* Wakil Walikota	127.000.000/Thn	127.000.000/Thn
	02 Bantuan Sewa Perumahan		
	* Sekda (perbulan)	5.000.000/Bln	5.000.000/Bln
	03 Belanja sewa gedung kantor per tahun	40,000,000	40,000,000
	04 Belanja sewa gedung BPP per tahun	-	**50,000,000**
	05 Belanja sewa ruang rapat / pertemuan		
	* Aula tempat peresmian / pelatihan (hotel)	2,000,000	2,000,000
	* Aula acara peresmian /pelatihan (Non Hotel)	1,000,000	1,000,000
	* Aula acara peresmian / pelatihan (SKB)	500,000	500,000
	06 Belanja sewa Hotel/ Penginapan/Wisma		
	* Tempat penginapan (wisma)untuk pelatihan/org	180,000	180,000
	* Tempat penginapan (hotel)untuk pelatihan/org	300,000	300,000

8 Belanja Makanan dan Minuman		
01 Belanja Makanan dan minuman rapat		
*Makan Rapat (VIP)	25,000	25,000
*Makan Rapat	20,000	20,000
*Minum/ Snack	10,000	10,000
02 Belanja Makanan dan Minuman diluar jam Dinas		
*Makan	20,000	20,000
*Minum/ Snack	7,500	7,500
03 Belanja Makan dan Minum Rumah Tangga KDH/WKDH/SEKDA (Perbulan)		
* Walikota	15,000,000	**30,000,000**
* Wakil Walikota	12,500,000	**25,000,000**
* Sekda	9,000,000	**20,000,000**
04 Belanja Makan dan Minum Tamu Setdako Lhokseumawe		
1. Makanan dan Minuman Hidangan (Porsi)		
* VIP	-	**200,000**
* Biasa	-	**150,000**
2. Makanan dan Minuman Prasmanan (Porsi)		
* VIP	-	**75,000**
* Biasa	-	**60,000**
3. Makanan dan Minuman Kotak		
* VIP	-	**35,000**
* Biasa	-	**25,000**
05 Belanja Snack		
1. Kue Piring dan Minuman (Porsi)		
* VIP	-	**20,000**
* Biasa	-	**15,000**
2. Kue Kotak dan Minuman		
* VIP	-	**12,000**
* Biasa	-	**8,000**
3. Buah-Buahan Campur/Piring	-	**100,000**
9.B Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		
01 Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH (PDH)		
* Walikota dan Wakil Walikota	2,500,000	2,500,000
02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)		
* Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRK/ Anggota DPRK	2,000,000	2,000,000
03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
* Walikota/ Wakil Walikota / Pimpinan DPRK/ Anggota DPRK	2,750,000	2,750,000
* Eselon II	2,500,000	2,500,000
* Eselon III	2,250,000	2,250,000
04 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)		
* Pimpinan DPRK / Anggota DPRK	2,000,000	2,000,000
05 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) /Pasang	500,000	500,000
06 Belanja Pakaian Dinas Harian lengan panjang		
* Pimpinan DPRK/ Anggota DPRK	1,500,000	1,500,000
07 Belanja Pakaian Linmas / Pasang	500,000	500,000
08 Belanja pakaian Korpri / Pasang	500,000	500,000
09 Belanja Pakaian Olah Raga Lengkap	700,000	700,000
10 Belanja Pakaian Muslim / Pasang	500,000	500,000
10.B Belanja pakaian Kerja lapangan		
a. Pakaian Wilayatul Hisbah	500,000	500,000
b. Pakaian Satpol PP	500,000	500,000
c. Pakaian Buruh/ kebersihan	350,000	350,000
3.A Honorarium Pada Belanja Langsung (Kegiatan)		
a. Honorarium Tim Pendukung Kelancaran Penyusunan Pedoman APBK, Dokumen Perencanaan & Dokumen Anggaran dan Pertanggungjawaban APBK		
* Penanggung Jawab	2,000,000	2,000,000
* Koordinator	1,800,000	1,800,000
* Ketua	1,600,000	1,600,000
* Wakil Ketua	1,500,000	1,500,000
* Sekretaris	1,300,000	1,300,000
* Anggota	1,200,000	1,200,000
b. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
* Penanggungjawab	3,500,000	3,500,000
* Wakil Penanggungjawab	3,300,000	3,300,000
* Ketua	3,200,000	3,200,000
* Wakil Ketua	3,000,000	3,000,000
* Sekretaris	2,800,000	2,800,000
* Anggota	2,500,000	2,500,000
c. Honorarium Tim Verifikasi dan Penelitian dalam Penyusunan APBK dan Perubahan APBK		
* Penanggungjawab	2,000,000	2,000,000
* Koordinator	1,800,000	1,800,000

* Ketua	1,600,000	1,600,000
* Wakil Ketua	1,500,000	1,500,000
* Sekretaris	1,300,000	1,300,000
* Anggota	1,200,000	1,200,000
d. Honorarium Tim Entry Penyusunan APBK dan Perubahan APBK		
* Koordinator	2,000,000	2,000,000
* Ketua	1,800,000	1,800,000
* Sekretaris	1,700,000	1,700,000
* Anggota	1,500,000	1,500,000
e. Honorarium Pelatihan BTCLS		
* Instruktur Pelatihan BTCLS Pusat	-	**300,000**
f. Honorarium Dewan Hakim MTQ		
* Dewan Hakim MTQ	-	**100,000**
g. Honorarium Tim Selektor		
* Tim Selektor DKPP	-	**1,000,000**
4.A Honorarium dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksana Program/ Kegiatan Unit Kerja		
a. Honor Tim Pelaksana Kegiatan pada Unit Kerja (SK Walikota)		
* Penanggung Jawab	1,500,000	1,500,000
* Pembina	1,300,000	1,300,000
* Koordinator	1,250,000	1,250,000
* Ketua	1,200,000	1,200,000
* Wakil Ketua	1,100,000	1,100,000
* Sekretaris	1,000,000	1,000,000
* Anggota	900.000	900.000
b. Honor Tim Pelaksana Kegiatan pada Unit Kerja (SK Kepala SKPD)		
* Penanggungjawab	1,000,000	1,000,000
* Ketua	800,000	800,000
* Sekretaris	700,000	700,000
* Anggota	500,000	500,000
c. Honor Tim Peninjauan Lapangan (Per SPT)		
* Ketua	100,000	100,000
* Sekretaris	80,000	80,000
* Anggota	60,000	60,000
d. Honor Tim Analisis/Tim Teknis Laboratorium (per bulan)		
* Kepala Laboratorium	500,000	500,000
* Tim Teknis/Tim Analisis	300,000	300,000
e. Honor Tim Penyusunan APBK /Pertanggung Jawaban APBK (Qanun dan Penjabaran)		
* Penanggung Jawab	-	**3,000,000**
* Koordinator	-	**2,900,000**
* Ketua	-	**2,800,000**
* Wakil Ketua	-	**2,700,000**
* Sekretaris	-	**2,600,000**
* Anggota	-	**2,300,000**
f. Honor Tim Asistensi Pembahasan Perubahan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe (per triwulan) SK Walikota		
* Koordinator	1,000,000	1,000,000
* Ketua	900,000	900,000
* Wakil Ketua	850,000	850,000
* Sekretaris	800,000	800,000
* Anggota	750,000	750,000
g. Honor Tim Pelayanan LPSE (Per Tahap)		
* Ketua/PPE	-	**1,500,000**
* IT System	-	**1,300,000**
* Admin Agency	-	**1,300,000**
* Verifikator	-	**1,300,000**
* Helpdesk	-	**1,300,000**
h. Honor Panitia		
* Honor Pengadaan Barang dan Jasa	1%	1%
* Honor Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa	1%	1%
i. Untuk Kegiatan yang Membutuhkan Keahlian/Tenaga Ahli atau Konsultan pada SKPD Harus Mempunyai Sertifikat Keahlian(SKA)		
* Ketua	7 Juta / Bulan	7 Juta / Bulan
* Anggota	5 Juta / Bulan	5 Juta / Bulan

ANALISIS STANDAR GAJI

NO	RINCIAN GOLONGAN	GAJI POKOK RATA-RATA	REVISI GAJI POKOK RATA-RATA
1	GOLONGAN IV	5,210,100	**5,392,200**
2	GOLONGAN III	4,310,100	**4,568,800**
3	GOLONGAN II	3,327,500	**3,638,200**
4	GOLONGAN I	2,340,100	**2,558,700**

REVISI STANDAR BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI

BELANJA DAERAH	ASB 2015	REVISI ASB 2015
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG		
A. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA		
1. Beasiswa		
* Pelajar	1,000,000	1,000,000
* D2 dan D3	2,500,000	2,500,000
* S1	5,000,000	5,000,000
* S2	10,000,000	10,000,000
* S3	30,000,000	30,000,000
2. PAUD/TK/RA	10,000,000	10,000,000
3. Olahraga Masyarakat	20,000,000	20,000,000
4. Sanggar Seni Gampong	5,000,000	5,000,000
5. Kegiatan Mahasiswa	5,000,000	5,000,000
6. PKK Gampong	15,000,000	15,000,000
7. Pramuka Kota Lhokseumawe	-	**400,000,000**
8. LPTQ Kota Lhokseumawe	-	**200,000,000**
9. Sanggar Pocut Meurah Inseun	-	**400,000,000**
B. SEKTOR SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN		
1. Rumah Kaum Dhuafa		
* Rehab Ringan	5,000,000	5,000,000
* Rehab Berat	20,000,000	20,000,000
2. Pengobatan Keluarga Kurang Mampu		
Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Lembaga Daerah		
* Penderita Penyakit yang di Rawat Inap	10,000,000	10,000,000
* Penderita Penyakit yang di Rawat Jalan	10,000,000	10,000,000
* Pendamping Pasien	2,000,000	2,000,000
3. Bantuan Fakir Miskin/Dhuafa/Muallaf dan Anak Yatim	5,000,000	5,000,000
4. Bantuan Makanan Anak Yatim Panti (Perhari)	30,000	30,000
5. Bantuan Makanan Lansia/Jompo (Perhari)	30,000	30,000
6. Bantuan Pemberdayaan dan Rehabilitasi	5,000,000	5,000,000
(Penyakit cacat, anak terlantar, tuna susila dan yang sejenis)		
C. SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI		
1. Modal Usaha Kelompok	6 Juta s/d 15 Juta	6 Juta s/d 15 Juta
2. Modal Usaha Mikro (perorangan)	5,000,000	5,000,000
3. Modal Usaha Koperasi	75,000,000	75,000,000
D. SEKTOR KEAGAMAAN		
1. Pasantren/Dayah		
* Type D	15,000,000	15,000,000
* Type C	25,000,000	25,000,000
* Type B	30,000,000	30,000,000
* Type A	40,000,000	40,000,000
2. Mesjid		
* Mesjid Agung Islamic Center	1,500,000,000	1,500,000,000
* Mesjid	200,000,000	200,000,000
3. Meunasah	50,000,000	50,000,000
4. Balai Pengajian	25,000,000	25,000,000
5. Majelis Ta'lim Kecamatan	10,000,000	10,000,000
6. Majelis Ta'lim Gampong	10,000,000	10,000,000
7. LPTQ Kecamatan	10,000,000	10,000,000
8. Remaja Mesjid	10,000,000	10,000,000
E. SEKTOR PERIKANAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN (Usaha Kelompok)		
1. Perikanan		
* Perikanan darat/laut (Kelompok)	20,000,000	20,000,000
* Perikanan darat/laut (Perorangan)	5,000,000	5,000,000
2. Pertanian		
* Tanaman Hortikultura, Alat-alat Pertanian, Pembibitan (Kelompok)	20,000,000	20,000,000
* Tanaman Hortikultura, Alat-alat Pertanian, Pembibitan (Perorangan)	5,000,000	5,000,000

3. Peternakan		
* Ternak Besar (Kelompok)	40,000,000	40,000,000
* Ternak Kecil (Kelompok)	25,000,000	25,000,000
* Ternak Unggas (Kelompok)	10,000,000	10,000,000
* Ternak (Perorangan)	5,000,000	5,000,000
F. LEMBAGA, YAYASAN DAN ORGANISASI MASYARAKAT		
1. Yayasan/Lembaga/Ormas (Maksimal)	150,000,000	**400,000,000**
2. Hibah LPTQ	-	**200,000,000**

- *) Angka Maksimal
- Mesjid Kemukiman (Bebrapa Desa)
- Mesjid Gampong (1 Gampong)

BAB IV
P E N U T U P

Demikian buku Revisi Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015 ini disusun untuk dijadikan bahan acuan setiap SKPD dalam menyusun Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA-P dan DPPA-SKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2015, yang pelaksanaannya berdasarkan bunyi pasal 89 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini pasal 4 ayat 1, juga menyebutkan bahwa penyusunan APBK, sesuai Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah disusun secara tertib, taat pada ketentuan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka pencapaian kinerja melalui tolok ukur kinerja dan target kinerja dari suatu kegiatan didasarkan Standar pada Belanja dan Plafon / batas biaya yang telah ditetapkan dalam buku Revisi Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Lhokseumawe Tahun 2015.